

Judul : MPR/DPR: persoalan kawasan pulau semestinya diatasi kementerian
Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

TATA KELOLA

MPR/DPR: Persoalan Kawasan Pulau Semestinya Diatasi Kementerian

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan pulau-pulau di Indonesia belakangan ini semestinya ditangani kementerian terkait. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto tak perlu ikut turun tangan.

Sorotan itu, antara lain, disimpulkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut dia, senjajata atas empat pulau yang melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ditangani oleh kementerian terkait, bukan oleh Presiden. Demikian pula keterisolasian Pulau Enggano, Bengkulu.

Muzani menyatakan, permasalahan tersebut seharusnya bisa ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bersangkutan dengan isu tersebut. Dia juga berpendapat, isu kewilayahan yang muncul akhir-akhir ini harus ditangani serius oleh kementerian terkait.

"Sebaiknya pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif dan mendalam sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi Presiden. Padahal, ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian," ujar Muzani yang juga menjabat Ketua MPR in di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Muzani juga mengingatkan lagi masalah terkait pulau-pulau terluar yang masuk dalam

situs jual beli Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN harus bertindak cepat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sudik juga menyoroti keterlibatan Presiden dalam menyelesaikan masalah terkait batas wilayah hingga pembangunan di pulau terluar. Dia menyebutkan, setiap kementerian seharusnya bisa bekerja sesuai porsi masing-masing sehingga tidak perlu membebankannya kepada Presiden.

"Masing-masing itu, kan, ada kewenangannya. Masing-masing itu sudah ada tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) untuk bekerja. Kalau dikritik-dikrit Presiden, apa gunanya pembantu Presiden," kata Zulfikar.

Kinerja yang lebih serius ini juga termasuk mengawalasi batas wilayah dan kondisi pulau-pulau terluar di Indonesia. Komisi II, lanjut Zulfikar, bakal memanggil kementerian terkait untuk mempertegas lagi batas-batas wilayah sehingga masalah serupa tak terulang lagi.

Zulfikar menekankan keseriusan Kemendagri dan daerah dalam menetapkan batas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengingung sejumlah undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 43/2008 tentang Wilayah Negara. Disamping itu, ada juga undang-undang tentang pembentukan daerah.

"Silakan kementerian terkait, terutama Kemendagri nanti posisi *leading sector* di pusat, bersama daerah membentuk tim penegasan untuk data di daerah ini," kata Zulfikar.

Disepakati Komisi II

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyebut penyelesaian empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut ini sebagai momentum bagi Kemendagri untuk menyelesaikan masalah tapal batas. Permasalahan ini harus menjadi perhatian karena menjadi sumber potensi konflik di tengah masyarakat.

"Saya sudah mengusulkan dan disepakati oleh Komisi II. Dalam rapat kerja nanti bersama Kemendagri dan Kemen-

terian ATR/BPN itu (masalah wilayah) akan menjadi tema yang kami bahas," ucapnya.

Menurut Ahmad Doli, pembatalan tersebut juga akan memotivasi perlunya regulasi baru dalam menangani masalah tapal batas wilayah, termasuk pulau-pulau terluar. Meski demikian, dia menyebut regulasi yang ada itu tidak ada masalah. Namun, perlu ditata ulang.

Ahmad Doli memaparkan, di periode sebelumnya, Komisi II DPR menemukan 20 provinsi serta sekitar 250 kabupaten dan kota yang diatur beberapa undang-undang. Padahal, seharusnya setiap daerah itu diatur satu undang-undang, termasuk di dalamnya terkait tapal batas.

"Pengaturan ini apakah cukup di level peraturan menteri

atau memang saatnya membuat regulasi yang lebih kuat. Walaupun regulasi yang sekarang sebetulnya tidak masalah, asal kita semua konsisten," ujarnya.

Di sisi lain, Doli mengapresiasi keterlibatan Presiden menangani masalah empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut. Dalam kasus tersebut, menurut Ahmad Doli, Presiden perlu mengambil alih karena ini masalah sensitif dan melibatkan ingatan kolektif masa lalu.

"Masyarakat Aceh ini punya trauma, punya sejarah yang tidak baik hubungannya dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah, mungkin Pak Prabowo melihat ini sebagai masalah sensitif sehingga perlu diambil alih dan masalah cepat selesai," tutur Ahmad Doli. (BOW/RTG/INA)